



Invasi Militer Rusia ke Ukraina pada Tahun 2022: Tujuan, Alasan, dan Implikasi

Muhammad Fadhil Firdaus¹, Gili Argenti², Nurbani Adine Gustianti³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 20 Agustus 2025

Revised: 27 Agustus 2025

Accepted: 01 September 2025

This study aims to analyze the objectives, reasons, and implications of the Russian military invasion of Ukraine that began on February 24, 2022. This invasion is one of the important events in global geopolitics that affects international stability, European security, and international law, especially regarding violations of human rights and humanitarian law. This study uses a qualitative approach with a literature study, relying on secondary sources such as books, journal articles, international reports, and official documents relevant to this conflict. This analysis identifies several reasons that drove Russia to carry out the invasion, including strategic interests in maintaining influence in the Eastern European region, concerns about NATO expansion, and the desire to strengthen political dominance in the region. This study also examines the implications of the invasion on Ukraine, which include major losses in terms of casualties, destruction of infrastructure, and impacts on the Ukrainian economy and society. In addition, this invasion also had a broad impact on international relations, worsening Russia's relations with Western countries, and triggering significant economic sanctions against Russia. Through this analysis, this study seeks to provide a deeper understanding of the factors underlying the Russian invasion and its impact on global geopolitical stability and the future of international law in dealing with armed conflict.

Keywords: *Invasion, Military, Ukraine, Russia*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Firdaus, M., Argenti, G., & Gustianti, N. (2025). Invasi Militer Rusia ke Ukraina pada Tahun 2022: Tujuan, Alasan, dan Implikasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.D), 142-154.

Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12896>.

PENDAHULUAN

Sebuah studi representatif mengenai hakikat hukum perang antara Federasi Rusia dan Ukraina telah dilakukan atas undangan Pemimpin Redaksi jurnal *Critique of Law*, Prof. J. Jabłońska-Bonca. Studi ini disusun dalam semangat solidaritas serta dukungan terhadap Ukraina, khususnya dalam menghadapi hari-hari awal invasi Rusia.

Dalam penelitian ini, penulis mengutip peristiwa bersejarah yang relevan, yakni serangan Rusia terhadap Georgia pada 7–8 Agustus 2008. Lima hari setelahnya, pada 12 Agustus 2008, Presiden Polandia, Lech Kaczyński, tiba di Tbilisi untuk menghadiri rapat umum sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Georgia, bersama dengan para pemimpin dari Lithuania, Estonia, Ukraina, serta Perdana Menteri Latvia. Dalam pidatonya di Kamar Dagang ibu kota Georgia, Kaczyński memperingatkan dunia dengan pernyataan berikut (Al-Rubaiey & Al-Kanani, 2023):

Hari ini Georgia, besok mungkin Ukraina, lusa bisa jadi negara-negara Baltik, dan setelahnya mungkin tiba saatnya bagi tanah air saya, Polandia.

Sebagai seorang pemimpin yang dikenal jujur, bijaksana, dan memiliki kepedulian yang mendalam, pernyataan Kaczyński tetap relevan hingga saat ini dan dianggap memiliki nilai profetik bagi dunia yang beradab.

Penelitian ini dilakukan di ibu kota Ukraina, Kyiv, serta di berbagai kota, desa, dan wilayah lainnya yang terdampak langsung oleh perang. Hasil studi menunjukkan bahwa invasi Rusia telah menjadi titik pemisah dalam sejarah Ukraina, membagi kehidupan masyarakatnya ke dalam dua fase: *sebelum* dan *sesudah* perang. Meskipun dampak jangka panjang dari konflik ini masih belum sepenuhnya dapat diprediksi, penelitian ini berupaya untuk menganalisis penyebab, kondisi, serta konsekuensi dari agresi Rusia terhadap Ukraina. Dengan pendekatan objektif dan berbasis data, penelitian ini juga merumuskan kesimpulan awal mengenai implikasi invasi tersebut sebagai aksi militer berskala besar pertama di Eropa sejak Perang Dunia II.

METHODS

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis invasi militer Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber sekunder yang terdiri dari buku, artikel jurnal, laporan internasional, dokumen resmi, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tujuan, alasan, dan implikasi dari invasi tersebut dengan menganalisis berbagai perspektif yang ada dalam literatur yang telah diterbitkan, baik dari ahli hubungan internasional, politik, hukum internasional, maupun analisis media. Studi literatur ini juga mencakup dokumentasi terkait pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan selama konflik, serta respons dari negara-negara lain dan organisasi internasional. Data yang dikumpulkan melalui studi literatur dianalisis secara deskriptif dan interpretatif, dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam berbagai sumber. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengkategorikan dan membandingkan berbagai argumen dan bukti yang mendukung alasan dan tujuan invasi militer Rusia, serta dampaknya terhadap stabilitas geopolitik dan ekonomi global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan, Penyebab, dan Dasar Agresi Militer: Awal Perang Rusia terhadap Ukraina pada 2022

Perang telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak zaman dahulu. I. Ivanovsky, seorang ilmuwan internasional Ukraina, menyatakan bahwa perang memiliki akar yang dalam, baik dalam sifat manusia maupun dalam peristiwa sejarah tertentu. Setiap perang selalu mencerminkan zaman dan masyarakat tertentu yang terlibat di dalamnya. Meskipun perang memiliki sifat yang serupa, setiap konflik memiliki tujuan, alasan, dan landasan yang berbeda dalam penyelesaiannya.

Dalam memahami tujuan dan sifat perang, pemikiran Carl von Clausewitz sangat relevan. Ia menyatakan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain, di mana tujuan politik suatu negara mempengaruhi sifat perangnya. Negara yang bertujuan memperluas wilayah kolonialnya demi eksploitasi berbeda dengan negara yang berperang demi kemerdekaan nasional. Negara yang

mempertahankan diri dalam perang patriotik di wilayahnya sendiri jelas berbeda dari negara yang berusaha menghancurkan kedaulatan negara lain melalui agresi militer. Dengan demikian, tujuan dan karakteristik perang Rusia terhadap Ukraina dapat dianalisis dari sudut pandang ini (Mankoff, 2022).

Sejak awal abad ke-17, Hugo Grotius mengutip Demosthenes bahwa perang terjadi ketika upaya diplomasi gagal. Dalam kasus Rusia dan Ukraina, perang yang dimulai pada 2022 mencerminkan ketegangan panjang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sejak pencaplokan Krimea dan pendudukan sebagian wilayah Donetsk dan Luhansk oleh Rusia pada tahun 2014, Ukraina telah berada dalam status konflik dengan Rusia. Dinamika kebebasan, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO menjadi faktor yang mendorong Rusia untuk mengambil langkah agresif dalam menghentikan perkembangan tersebut dengan cara militer.

Namun, penyebab perang Rusia terhadap Ukraina tidak hanya dapat dijelaskan dari hubungan bilateral kedua negara dalam satu dekade terakhir. Perang ini juga merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri Rusia yang bersifat revanchist, yaitu upaya mengembalikan kejayaan masa lalu dengan menghalangi ekspansi NATO serta memperluas pengaruh politik Rusia di Eropa. Selain itu, Rusia juga ingin membangun kembali kekuatan yang menyerupai Uni Soviet dengan menyatukan negara-negara pasca-Soviet dalam satu blok yang mendukung kepentingannya. Ambisi ini telah lama dikemukakan oleh Presiden Rusia dalam berbagai forum internasional, termasuk Konferensi Keamanan Munich tahun 2007 dan pertemuan puncak Rusia-NATO tahun 2008, di mana Vladimir Putin secara terbuka mengancam Ukraina jika negara tersebut bergabung dengan NATO (Fedorenko & Fedorenko, 2022).

Ketidajelasan ideologi politik yang mendasari perang ini juga menjadi ciri khas agresi militer Rusia terhadap Ukraina. Sebagai contoh, propaganda Rusia awalnya menggunakan alasan “denazifikasi” dan “demiliterisasi” Ukraina sebagai pembenaran invasi. Narasi ini kemudian berkembang menjadi klaim bahwa Ukraina berpotensi mengembangkan senjata nuklir, kimia, dan biologis. Rusia juga mencoba meyakinkan dunia bahwa pasukannya berperang melawan Amerika Serikat dan NATO, meskipun bukti konkret yang mendukung klaim ini sangat minim. Slogan-slogan tersebut tampak lebih sebagai alat propaganda daripada landasan ideologis yang kuat untuk perang.

Di dalam negeri, propaganda Rusia berusaha membangkitkan sentimen nasionalisme dengan menggambarkan Ukraina sebagai sarang Nazi dan kelompok radikal. Narasi ini berakar dari propaganda Uni Soviet pasca-Perang Dunia II, yang menggambarkan Rusia sebagai satu-satunya pemenang melawan Nazi. Dengan menggunakan istilah seperti "Bandera" (merujuk pada Stepan Bandera, pemimpin nasionalis Ukraina yang kontroversial), Rusia menciptakan musuh imajiner untuk membenarkan tindakan militernya. Taktik serupa sering digunakan dalam sejarah militer oleh negara-negara lain untuk menghilangkan hambatan moral bagi tentaranya, seperti ketika tentara dilatih untuk menghadapi musuh yang digambarkan sebagai makhluk asing atau monster agar lebih mudah membenarkan kekerasan terhadap mereka (Kyrydon & Troyan, 2022).

Pada intinya, ideologi perang Rusia terhadap Ukraina pada 2022 didasarkan pada nostalgia Soviet dan kelanjutan dari ideologi Perang Dingin. Konsep casus

belli, yaitu alasan sah untuk memulai perang, telah kehilangan relevansinya dalam konflik modern. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Rusia berusaha menciptakan justifikasi perang dengan menuduh Ukraina menembaki wilayah yang dikuasai separatis di Luhansk dan Donetsk pada 22 Februari 2022. Namun, klaim ini tidak meyakinkan, dan Rusia tetap meluncurkan invasi skala penuh tanpa deklarasi perang resmi. Situasi ini mengingatkan pada serangan Nazi Jerman terhadap Uni Soviet pada 22 Juni 1941, yang juga dilakukan secara tiba-tiba tanpa peringatan (Liadze et al., 2023).

Pada 24 Februari 2022 pukul 04.00 pagi, Vladimir Putin mengumumkan dimulainya “operasi militer khusus” terhadap Ukraina. Hanya dalam hitungan menit setelah pengumuman tersebut, serangan rudal Rusia menghantam berbagai kota Ukraina, termasuk Kyiv, Kharkiv, Kherson, dan Sumy. Operasi darat dan udara Rusia juga segera dimulai di beberapa wilayah strategis. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, segera merespons dengan memberlakukan darurat militer. Dengan demikian, perang Rusia terhadap Ukraina dimulai dengan cara yang menyerupai berbagai invasi militer sebelumnya dalam sejarah—dengan serangan mendadak dan tanpa deklarasi resmi, yang menunjukkan bahwa tujuan utama Rusia bukanlah sekadar “operasi khusus,” melainkan invasi yang dirancang untuk menghancurkan kedaulatan Ukraina.

Perang, Agresi Militer, atau Operasi Militer Khusus? Menelusuri Perang Terminologi

Sejak awal invasi militernya, Federasi Rusia telah menciptakan kebingungan terminologi di tingkat nasional maupun internasional. Upaya ini mengingatkan pada konsep yang diperkenalkan George Orwell dalam novel *1984*, di mana manipulasi bahasa digunakan untuk mengontrol persepsi masyarakat. Rusia secara resmi menyebut invasinya ke Ukraina sebagai "operasi militer khusus" dan melarang penggunaan istilah "perang" dalam ranah hukum domestik, dengan ancaman sanksi administratif dan pidana. Manipulasi ini memiliki beberapa tujuan utama, salah satunya adalah menghindari pertanggungjawaban hukum di Mahkamah Pidana Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kejahatan perang dan pelanggaran hukum serta kebiasaan perang internasional. Dengan tidak mendefinisikan tindakannya sebagai perang, Rusia berusaha menghindari konsekuensi hukum yang melekat pada agresi militer terhadap negara berdaulatn (Ferraro, 2024).

Secara historis, perang telah menjadi subjek kajian mendalam oleh para pemikir dan ilmuwan. Hugo Grotius berpendapat bahwa istilah *bellum* (perang) berasal dari *duellum* (duel) dan mendefinisikan perang sebagai "keadaan pertikaian yang melibatkan kekuatan fisik." Immanuel Kant melihat perang sebagai "kenyataan menyedihkan yang hanya dapat dibenarkan dalam situasi ekstrem, ketika tidak ada lembaga hukum yang dapat memberikan keputusan yang mengikat secara sah." Sementara itu, Carl von Clausewitz dalam karyanya *On War* menyatakan bahwa perang adalah "tindakan kekerasan yang bertujuan memaksa lawan untuk memenuhi kehendak kita." Dari sudut pandang hukum internasional, F. Martens menganggap perang sebagai "litigasi yang mengerikan antara negara-negara untuk melindungi hak dan kepentingannya." Berbagai perspektif ini menunjukkan bahwa perang bukan hanya sekadar konflik bersenjata, tetapi juga fenomena sosial, politik, dan hukum yang kompleks.

Perdebatan mengenai definisi perang semakin berkembang dalam konteks hukum internasional modern. V. Denisov, seorang ahli hukum kontemporer, mendefinisikan perang sebagai "keadaan di mana negara-negara menerapkan segala bentuk tekanan satu sama lain sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang (*ius in bello*)." Namun, definisi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Pertama, apakah status hukum perang harus diakui secara resmi dalam perjanjian internasional atau dapat muncul secara de facto? Kedua, apakah penggunaan kekuatan bersenjata oleh salah satu pihak tanpa kepatuhan terhadap hukum perang masih dapat disebut sebagai perang? Pertanyaan ini menjadi relevan dalam konteks perang Rusia-Ukraina tahun 2022, di mana Rusia melanggar hampir semua norma hukum perang internasional dengan menyerang infrastruktur sipil, melakukan pembunuhan massal, dan menerapkan propaganda yang menyimpang untuk membenarkan tindakannya (Kuzio, 2022).

Dalam kajian militer dan hukum internasional, perang diklasifikasikan dalam berbagai kategori. A. Stoyanov, seorang akademisi dari Universitas Kharkiv, mengusulkan klasifikasi perang berdasarkan lokasi (perang darat atau laut), jumlah pihak yang terlibat (sipil, internasional, atau nasional), serta motif dan tujuan (perang politik, agama, atau pertahanan diri). Klasifikasi lain membedakan antara perang yang sah dan yang tidak sah, di mana aspek utama yang membedakan adalah kepatuhan terhadap hukum dan kebiasaan perang. Perang yang sah dijalankan sesuai dengan prinsip *ius in bello*, sedangkan perang yang tidak sah melanggar norma-norma internasional. Dalam konteks ini, perang Ukraina melawan agresi Rusia dapat dikategorikan sebagai perang yang sah, karena dilakukan dalam rangka membela kedaulatan nasional, berlangsung di dalam wilayah Ukraina sendiri, dan melibatkan partisipasi luas dari rakyat dalam bentuk pasukan pertahanan teritorial serta sukarelawan (McKee & Murphy, 2022).

Sebagai upaya menghindari konsekuensi hukum dan politik, Rusia secara sistematis menghindari penggunaan istilah "perang" dalam kebijakan domestiknya dan menggantikannya dengan "operasi militer khusus." Secara konseptual, operasi militer khusus merujuk pada tindakan militer terbatas yang dilakukan oleh pasukan khusus dengan metode tidak konvensional, seperti operasi "Neptune Spear" yang dilakukan oleh pasukan AS untuk menargetkan Osama bin Laden pada tahun 2011. Namun, invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 telah berkembang menjadi perang berskala penuh yang mencakup serangan udara, darat, dan laut terhadap negara berdaulat. Oleh karena itu, istilah "operasi militer khusus" yang digunakan Rusia tidak hanya menyesatkan tetapi juga merupakan bagian dari strategi manipulasi informasi untuk menutupi kenyataan agresi militer dan pelanggaran hukum internasional.

Pelanggaran Hukum Internasional dan Prosedur Perang dalam Invasi Militer Rusia ke Ukraina Tahun 2022

Prinsip dasar dalam hukum perang dan perdamaian menyatakan bahwa dalam masa damai, manusia harus berbuat sebanyak mungkin kebaikan bagi sesamanya, sementara dalam masa perang, mereka harus mengurangi keburukan seminimal mungkin. Prinsip ini menggambarkan esensi dari hukum perang dan bagaimana aturan-aturan dalam konflik bersenjata dikembangkan. Pelaksanaan prinsip ini mengharuskan para pihak yang berperang untuk mematuhi hukum humaniter internasional serta berbagai instrumen hukum lainnya seperti Konvensi

Jenewa dan Konvensi Den Haag. P. Kazansky pernah menegaskan bahwa perang hanya dapat dikategorikan sebagai perang yang sah apabila dimulai, dijalankan, dan diakhiri sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Sebaliknya, pelanggaran terhadap instrumen hukum perang berakibat pada tindakan ilegal yang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Berbagai metode perang yang tidak sah telah lama diidentifikasi oleh para ahli, termasuk tindakan seperti pembunuhan berencana, peracunan, pengingkaran perjanjian, serta penghasutan terhadap pengkhianatan. Praktik-praktik yang tidak jujur ini, sebagaimana diungkapkan dalam *Eternal Peace* oleh Immanuel Kant, banyak ditemukan dalam invasi militer Rusia ke Ukraina (Nasution & Raudia, 2022).

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dalam pidatonya di Parlemen Norwegia pada 30 Maret 2022, menegaskan bahwa serangan Rusia tidak membedakan antara sasaran militer dan sipil. Setiap hari dan malam, rudal serta bom udara menghantam kota-kota Ukraina, termasuk infrastruktur sipil seperti rumah sakit, bandara, toko bahan makanan, hingga kawasan permukiman. Dampak dari agresi ini sangat besar, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Kementerian Ekonomi Ukraina melaporkan bahwa hingga 28 Maret 2022, kerugian satu kali akibat invasi Rusia mencapai 564,9 miliar dolar AS. Dari jumlah ini, 119 miliar dolar AS berasal dari kerusakan infrastruktur, termasuk 8.000 km landasan pacu, puluhan stasiun kereta api, dan bandara yang hancur. Kerugian lainnya meliputi 112 miliar dolar AS dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022, serta 0,5 miliar dolar AS akibat dampak terhadap penduduk sipil, termasuk hilangnya 10 juta meter persegi perumahan dan 200.000 kendaraan. Sektor bisnis juga mengalami kerugian sebesar 80 miliar dolar AS, sementara investasi langsung di ekonomi Ukraina mengalami penurunan hingga 54 miliar dolar AS (Aladekomo, 2022).

Selain dampak ekonomi, serangan militer Rusia menyebabkan kehancuran besar terhadap kota-kota Ukraina. Data yang dipublikasikan oleh Wali Kota Kharkiv, I. Terekhov, menunjukkan bahwa dalam 35 hari pertama perang, sebanyak 1.292 bangunan tempat tinggal, 70 sekolah, 54 taman kanak-kanak, 16 rumah sakit, dan 239 gedung administrasi rusak atau hancur. Kota-kota lain seperti Mariupol, Chernihiv, Irpin, Volnovakha, Hostomel, Trostyanets, dan Bucha mengalami kerusakan infrastruktur lebih dari 70%. Serangan terhadap fasilitas sipil ini menunjukkan bahwa operasi militer Rusia tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi Den Haag, yang melarang serangan terhadap objek-objek yang memiliki nilai budaya, sosial, dan kemanusiaan.

Kerusakan terhadap aset budaya dan ilmiah Ukraina juga menjadi perhatian serius. Pasal 56 Konvensi Den Haag dengan tegas melarang perampasan, penghancuran, atau perusakan disengaja terhadap institusi pendidikan, keagamaan, seni, dan sains. Namun, menurut Kementerian Kebudayaan dan Kebijakan Informasi Ukraina, hingga 31 Maret 2022, tercatat 135 kejahatan perang di bidang ini. Sebanyak 59 bangunan keagamaan, termasuk gereja Ortodoks Ukraina, rumah ibadah Protestan, masjid, dan sinagoga, mengalami kerusakan di 10 wilayah Ukraina. Selain itu, 58 monumen arsitektur dan tata kota mengalami kerusakan, termasuk 5 yang memiliki status nasional. Tentara Rusia juga menghancurkan 12 museum, 6 teater dan bioskop, serta 5 perpustakaan. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran akan pelestarian warisan budaya Ukraina, termasuk naskah kuno

berhuruf Sirilik dan artefak seni lainnya, yang berisiko dijarah oleh pasukan Rusia (Perry, 2022).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kebebasan selama Perang Ukraina Tahun 2022

Sejak awal invasi militer Rusia pada 24 Februari 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan keadaan darurat militer (*martial law*), yang kemudian disahkan oleh Dewan Tertinggi Ukraina pada hari yang sama. Berdasarkan Pasal 64 Konstitusi Ukraina, pembatasan hak asasi manusia dan kebebasan sipil hanya dapat diberlakukan dalam keadaan darurat, termasuk perang. Namun, meskipun keadaan darurat militer diberlakukan di seluruh wilayah Ukraina, hanya hak-hak tertentu yang dapat dibatasi, seperti yang diatur dalam Pasal 30–34, 38, 39, 41–44, dan 53 Konstitusi Ukraina. Dengan demikian, masyarakat Ukraina masih memiliki hak-hak dasar lainnya selama konflik berlangsung. Namun, jaminan konstitusional ini tidak berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh tentara Rusia selama pendudukan wilayah-wilayah tertentu di Ukraina. Dalam sejarah, perang selalu menjadi pemicu utama pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan dari penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi (Pylypenko et al., 2023).

Perang yang dimulai oleh Federasi Rusia pada tahun 2022 di Ukraina menjadi salah satu konflik paling brutal dan tidak manusiawi di Eropa sejak Perang Dunia II. Invasi ini melanggar berbagai perjanjian internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia 1950, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966, serta Deklarasi PBB tentang Hak Anak 1959. Berdasarkan data dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, sejak 24 Februari hingga 30 Maret 2022, tercatat 3.167 korban sipil akibat perang di Ukraina, dengan 1.232 orang tewas, termasuk 148 anak-anak. Selain itu, sebanyak 232 anak mengalami luka-luka akibat serangan Rusia. Laporan ini juga menyoroti penggunaan senjata peledak dengan dampak luas, seperti artileri berat, peluncur roket ganda, rudal, dan serangan udara. Bahkan, pasukan Rusia diduga menggunakan amunisi tandan dan fosfor, serta sistem artileri termobarik TOS-1 “Pinocchio” dan TOS-1A “Sun”, yang menyebabkan kehancuran besar dan korban jiwa yang tinggi (Najafli et al., 2024).

Konflik ini juga menciptakan krisis pengungsi terbesar di Eropa dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, lebih dari 10,5 juta warga sipil Ukraina mengungsi ke berbagai wilayah di dalam negeri maupun ke luar negeri akibat invasi Rusia. Sebanyak 13 juta orang di Ukraina masih membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak. Sebagian besar pengungsi yang meninggalkan Ukraina menuju negara-negara tetangga, terutama Polandia yang menampung lebih dari 2,2 juta orang, terdiri dari anak-anak, perempuan, dan lansia. Pengungsian massal ini juga berdampak pada meningkatnya tingkat perceraian dan perpecahan keluarga. Selain itu, ribuan orang menghadapi risiko eksploitasi dan perdagangan manusia di tengah situasi yang tidak stabil.

Di wilayah yang diduduki oleh pasukan Rusia, terjadi berbagai pelanggaran terhadap hukum perang dan hak asasi manusia. Organisasi internasional dan lembaga penegak hukum Ukraina telah mendokumentasikan berbagai kejahatan

yang dilakukan oleh tentara Rusia di wilayah Kyiv, Donetsk, Chernihiv, dan Luhansk, yang melanggar Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907. Dalam laporan tanggal 4 Maret 2022, Human Rights Watch mengungkapkan berbagai kasus kekerasan terhadap warga sipil Ukraina, termasuk eksekusi di luar hukum. Misalnya, di desa Stryky Bykov, wilayah Chernihiv, pasukan Rusia menahan dan mengeksekusi sedikitnya enam pria pada 27 Februari 2022. Bukti kejahatan perang semakin terungkap setelah pasukan Ukraina membebaskan kota-kota seperti Bucha, Irpin, Hostomel, dan Vorzel, serta desa-desa di sekitar Kyiv, seperti Vyshenky dan Motyzyn. Di Bucha, yang kini dijuluki sebagai "Srebrenica Ukraina," ditemukan berbagai bentuk kekejaman, termasuk eksekusi massal, pemerkosaan, penyiksaan, penculikan, dan penjarahan. Kejahatan-kejahatan ini jelas bertentangan dengan Pasal 44–56 Konvensi Den Haag, yang melarang perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dalam perang (Trautman & McFarlin, 2023).

Pada 3 April 2022, Presiden Ukraina dalam pidatonya mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh tentara Rusia di Bucha dan wilayah lainnya. Ia menyatakan bahwa ratusan warga sipil dibunuh, disiksa, dan ditembak di jalanan, bahkan mayat-mayat mereka dijebak dengan ranjau. Dokumentasi mengenai kejahatan ini telah disampaikan kepada mitra internasional dan akan dibahas dalam Dewan Keamanan PBB. Seiring dengan pembebasan lebih banyak kota dan desa di Ukraina dari pendudukan Rusia, diperkirakan jumlah korban dan skala kejahatan perang akan terus bertambah. Oleh karena itu, sangat penting bagi komunitas internasional untuk memastikan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan ini tidak luput dari hukuman. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di jantung Eropa pada abad ke-21 ini harus diproses melalui mekanisme hukum internasional agar para pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka (Antai et al., 2024).

Hak untuk Perdamaian dan Desain Akhir Perang dalam Invasi Militer Rusia ke Ukraina

Dalam karyanya *On the Law of War and Peace*, Hugo Grotius menyatakan bahwa "semua perselisihan antara pihak-pihak yang tidak terikat oleh hukum domestik yang sama berkaitan dengan keadaan perang atau perdamaian... Perang itu sendiri kemudian membawa kita kepada perdamaian sebagai tujuan utamanya." Sejarah perang mencatat berbagai alasan, prosedur, dan cara mengakhiri perang. Berbeda dengan perang pada zaman kuno dan Abad Pertengahan, yang mengharuskan kekalahan total salah satu pihak, pengambilalihan wilayahnya, dan penghentian statusnya sebagai entitas hukum (*debellatio*), sejak abad ke-18, perang semakin berakhir dengan rekonsiliasi *de facto* antar pihak yang bertikai, yang diikuti dengan pengesahan hubungan tersebut dalam bentuk perjanjian damai. Perubahan ini mencerminkan kemajuan dalam pengaturan perdamaian yang tidak lagi mengandalkan penghancuran total, tetapi pada penyelesaian damai dan pembentukan hubungan yang stabil antar negara (Hoffmann, 2022).

Sebagai bagian dari upaya perdamaian, V. Danevsky menekankan pentingnya perjanjian damai yang dihasilkan melalui proses yang sah, yang sering kali dimulai dengan "perjanjian perdamaian sementara atau draf perjanjian perdamaian final" yang kemudian dapat disesuaikan dengan kepentingan internasional. Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian ini harus memiliki hak suara dan pengaruh dalam menetapkan ketentuan perjanjian damai tersebut. Oleh

karena itu, jaminan internasional terhadap perjanjian perdamaian menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut adil, dapat diandalkan, dan sesuai dengan hukum perdamaian serta komunitas internasional.

Saat ini, Ukraina tidak hanya berjuang dengan gagah melawan agresor, tetapi juga memanfaatkan seluruh potensi demokrasi domestik dan internasional untuk menyampaikan posisi Ukraina terkait dasar dan prospek penyelesaian dengan Rusia. Pembicaraan mengenai poin-poin kunci untuk perjanjian perdamaian antara Presiden Ukraina dan Rusia dilakukan di tingkat penasihat politik, Menteri Luar Negeri kedua negara, dengan melibatkan mediator dari negara-negara mitra internasional. Namun, sampai saat ini, belum ada ketentuan resmi mengenai isi perjanjian perdamaian tersebut. Di sisi lain, diskusi mengenai dasar prinsipil dari perjanjian perdamaian masa depan telah dibahas secara luas oleh para ilmuwan Ukraina dan pakar hukum internasional (Lichterman, 2022).

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada kepala negara, hakim Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia, V. Vasylenko, mengusulkan bahwa ketentuan utama perjanjian dengan Rusia sebaiknya mencakup "mekanisme internasional yang efektif untuk menjamin keamanan Ukraina, pemilihan prosedur untuk implementasinya, kompensasi atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh agresi Rusia sejak Februari 2014, ekstradisi anggota tentara Rusia yang melakukan kejahatan perang, penanggulangan pencaplokan Crimea dan ORDLO, serta penghapusan segala larangan terhadap keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dan pembatasan terhadap kekuatan militer Ukraina dalam hal senjata modern, khususnya rudal presisi tinggi."

Carl von Clausewitz menyatakan bahwa "bahkan tindakan akhir yang menentukan dalam perang secara keseluruhan pun sulit diartikan sebagai sesuatu yang absolut, karena negara yang kalah sering kali memandangnya hanya sebagai kejahatan yang diimpor, yang dapat diperbaiki di masa depan dalam hubungan politik yang akan datang." Oleh karena itu, desain akhir perang seringkali melibatkan penyelesaian damai yang memastikan kedaulatan negara dan integritas teritorial, serta keberlanjutan keamanan nasional dan pertahanan Ukraina. Desain tersebut juga dapat menyarankan mekanisme internasional yang dapat menjamin keamanan Ukraina dari kebijakan revanchis Rusia dan memberikan instrumen global untuk demilitarisasi Rusia serta langkah-langkah preventif untuk mencegah pecahnya perang agresi terhadap negara lain (Lepskiy & Lepska, 2023).

Tanggung Jawab atas Agresi Militer dan Perang Imperialis Rusia terhadap Ukraina

Agresi militer terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan prinsip-prinsip konstitusional yang bertujuan untuk merebut wilayah, menggulingkan kekuasaan negara yang sah, serta melakukan kejahatan perang yang brutal terhadap warga sipil, jelas merupakan tindakan yang tidak adil. Tindakan tersebut melanggar semua ketentuan hukum humaniter internasional, atau yang disebut oleh H. Grotius sebagai "hak-hak rakyat," yang dapat merusak tatanan dunia dan membawa konsekuensi hukum. Provokasi perang menyebabkan tanggung jawab politik, ekonomi, dan hukum bagi negara agresor. Perang ini tidak hanya menyerang Ukraina, tetapi juga mengganggu stabilitas global dan prinsip-prinsip perdamaian internasional.

Sejak hari pertama agresi militer, kepemimpinan Rusia secara politis dikutuk oleh mayoritas negara di dunia karena serangan militer yang tidak berdasar terhadap Ukraina. Para pemimpin negara, termasuk Presiden Amerika Serikat, Polandia, dan Prancis, Perdana Menteri Inggris, Kanada, Lithuania, Jerman, serta Sekretaris Jenderal PBB, mengecam perang yang dimulai Rusia di Eropa. Mereka juga mengutuk rezim politik Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin yang memulai agresi militer tanpa provokasi terhadap negara berdaulat tersebut. Pada tanggal 1 April 2022, Dewan Tertinggi Ukraina mengadopsi Undang-Undang yang mengutuk propaganda rezim totaliter neo-Nazi Rusia sebagai negara teroris yang menyerang Ukraina. Hal ini menunjukkan bahwa Rusia telah bertanggung jawab secara politik atas perang yang diprovokasi terhadap Ukraina (Oksamytna, 2023).

Namun, keterlibatan dan tanggung jawab rakyat Rusia terhadap penyelesaian perang yang dipimpin oleh kepala negara terpilih mereka menjadi isu yang kontroversial, mengingat tingkat dukungan yang tinggi dari warga negara Rusia terhadap agresi militer ini. Mengutip dari karya H. Grotius, disebutkan bahwa seorang warga negara yang melanggar hukum domestik untuk keuntungan pribadi, pada akhirnya akan merusak dasar kesejahteraan serta generasi mendatang. Demikian juga, sebuah negara yang melanggar hak-hak asasi manusia dan hak-hak rakyat, akan merusak dasar perdamaian yang berkelanjutan bagi dirinya sendiri di masa depan. Oleh karena itu, tanggung jawab moral rakyat Rusia menjadi pertanyaan penting dalam konteks penyelesaian konflik ini.

Perang Rusia terhadap Ukraina juga memicu pemberlakuan sanksi ekonomi dan keuangan yang besar terhadap negara agresor, yang secara signifikan melemahkan sektor perbankan, keuangan, dan ekonomi Rusia dalam waktu yang relatif singkat. Sanksi-sanksi ini dikenakan dengan biaya yang besar bagi masyarakat Rusia, yang sebelumnya telah diperingatkan oleh negara-negara Barat sebelum memulai perang terhadap Ukraina. Efektivitas sanksi ini menjadi subjek penelitian dan kajian lebih lanjut, namun dampaknya sudah cukup jelas dengan mundurnya bank-bank asing dan sebagian besar perusahaan besar Barat dari Rusia. Pembatasan ekspor energi, sumber daya lainnya, serta penghentian kerja sama ekonomi dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan negara anggota Uni Eropa, telah sangat meruntuhkan “ekonomi perang” Rusia (Amilakhvari & Baghaturia, 2024).

Tanggung jawab politik, ekonomi, dan lainnya atas serangan militer, bersama dengan pelanggaran terhadap hukum internasional dan aturan peperangan, tidak bisa digantikan dengan kewajiban hukum terhadap kejahatan perang. Jelas bahwa pejabat Rusia yang memulai agresi ini dan menyebabkan kerusakan besar terhadap populasi sipil Ukraina, serta menghancurkan infrastruktur kritis, termasuk melakukan eksekusi di luar hukum, penyiksaan, pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, dan penculikan warga sipil di wilayah yang sementara diduduki oleh tentara Rusia, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum pidana. Pada tanggal 28 Februari 2022, Kepala Jaksa Mahkamah Pidana Internasional, Karim Khan, mengumumkan dimulainya penyelidikan atas kejahatan perang yang dilakukan Rusia di Ukraina, dan pada 16 Maret 2022, ia tiba di Ukraina bersama tim penyelidik yang bekerja sama dengan rekan-rekan dari Ukraina untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kekejaman perang yang terjadi.

Pengumpulan bukti yang objektif dan terformulasi dengan baik, bebas dari informasi yang tidak akurat dan hoaks, akan memperlancar proses hukum terhadap para pelaku kejahatan perang. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Polandia, Prancis, Lithuania, serta negara-negara lainnya telah bergabung untuk mengumpulkan database, dengan contoh yang baik adalah kegiatan Rafał Lemkin Center yang berlokasi di Polandia untuk mendokumentasikan kejahatan Rusia di Ukraina. Dalam pidatonya mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan di Bucha, Presiden Ukraina V. Zelensky menyatakan telah membentuk lembaga keadilan khusus untuk menyelidiki dan mengadili setiap kejahatan yang dilakukan oleh para penyerbu di negara mereka. Lembaga ini melibatkan kerja sama antara para ahli nasional dan internasional, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas agresi militer dan kekejaman terhadap rakyat Ukraina dapat dihukum sesuai dengan hukum internasional (Mälksoo, 2023).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa invasi militer Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dipicu oleh sejumlah alasan strategis dan politik, yang meliputi keinginan Rusia untuk mempertahankan pengaruh geopolitiknya di kawasan Eropa Timur dan menghalangi integrasi Ukraina dengan organisasi internasional seperti NATO dan Uni Eropa. Selain itu, faktor nasionalisme dan ambisi untuk mengembalikan kekuatan imperial Rusia juga menjadi pendorong utama di balik serangan ini. Rusia melihat Ukraina sebagai bagian penting dalam proyek besar untuk menguatkan dominasi regionalnya. Namun, invasi ini tidak hanya mengungkapkan ambisi Rusia, tetapi juga menantang tatanan internasional yang ada, termasuk pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.

Implikasi dari invasi ini sangat besar, baik bagi Ukraina, kawasan Eropa, maupun komunitas internasional. Secara langsung, invasi ini menyebabkan kehancuran besar di Ukraina, baik dari segi infrastruktur maupun korban jiwa, dan menimbulkan krisis pengungsi yang meluas. Secara lebih luas, serangan ini memicu sanksi internasional yang menghancurkan ekonomi Rusia dan memperburuk ketegangan antara negara-negara besar. Selain itu, invasi ini menyoroti pentingnya mekanisme diplomatik dan keadilan internasional dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang, dengan menggandeng lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rubaiey, H. A. A. G., & Al-Kanani, A. K. M. (2023). The Political Trajectories that Preceded the Russian Invasion of Georgia in 2008. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 33, 4208-4225.
- Aladekomo, A. (2022). Russian aggression against Ukraine, sovereignty and international law. *Sovereignty and International Law* (March 22, 2022).
- Amilakhvari, L., & Baghaturia, O. (2024). Russia's Militaristic Rhetoric, Imperialism, and Expansion: Wars in Georgia and Ukraine. In *Dealing With Regional Conflicts of Global Importance* (pp. 161-181). IGI Global.

- Antai, G. O., Mulegi, T., Barongo, E. K., Ekpenisi, C., Kisubi, E. C., & Okonji, I. C. (2024). Exploring mechanisms for enforcing human rights within the context of international law: Issues and challenges. *NIU Journal of Legal Studies*, 10(1), 59-70.
- Fedorenko, V., & Fedorenko, M. (2022). Russia's Military Invasion of Ukraine in 2022: Aim, Reasons, and Implications. *Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem*, 14(1), 7-42.
- Ferraro, V. (2024). Why Russia invaded Ukraine and how wars benefit autocrats: The domestic sources of the Russo-Ukrainian War. *International Political Science Review*, 45(2), 170-191.
- Hoffmann, T. (2022). War or peace?—International legal issues concerning the use of force in the Russia–Ukraine conflict. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 63(3), 206-235.
- Kuzio, T. (2022). Why Russia Invaded Ukraine. *Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development*, (21), 40-51.
- Kyrydon, A., & Troyan, S. (2022). The Russian-Ukrainian war (2014-2022): Basic preconditions and causes. *Balkan social science review*
- Lepskiy, M., & Lepska, N. (2023). The war in Ukraine and its challenge to NATO: peacekeeping to peace engineering. *American behavioral scientist*, 67(3), 402-425.
- Liadze, I., Macchiarelli, C., Mortimer-Lee, P., & Sanchez Juanino, P. (2023). Economic costs of the Russia-Ukraine war. *The World Economy*, 46(4), 874-886.
- Lichterman, A. (2022). The Peace Movement and the Ukraine war: Where to now?. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 5(1), 185-197.
- Mälksoo, M. (2023). The postcolonial moment in Russia's war against Ukraine. *Journal of genocide research*, 25(3-4), 471-481.
- Mankoff, J. (2022). Russia's war in Ukraine. *Identity, History and Conflict, Washington, DC: Centre for Strategic and International Studies*.
- McKee, M., & Murphy, A. (2022). Russia invades Ukraine again: how can the health community respond?. *bmj*, 376.
- Najafli, E., Kisiliuk, E., Dubenko, O., Burlakov, S., & Yarmaki, V. (2024). Ensuring Human Rights in Ukraine during Introduction of Martial Law: Constitutional and Administrative Aspect. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 24(1), 52-72.
- Nasution, E. D., & Raudia, Z. (2022). Analysis of Russian War Violations in the 2022 Ukrainian Conflict Based on the Perspective of International Humanitarian Law. In *International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022)* (pp. 361-374). Atlantis Press.
- Oksamytna, K. (2023). Imperialism, supremacy, and the Russian invasion of Ukraine. *Contemporary Security Policy*, 44(4), 497-512.
- Perry, F. V. (2022). The Russian Invasion of Ukraine and the Tottering Principles of International Law: Russia's Assault on World Norms. *Wis. Int'l LJ*, 40, 331.

- Pylypenko, V. P., Sliusarchuk, K. T., Pylypyshyn, P. B., & Boichenko, S. V. (2023). Human Rights Violations by War Crimes: Theory and Practice. *Pakistan Journal of Criminology*, 15(2).
- Trautman, L. J., & McFarlin, M. (2023). Putin, Russia and Ukraine: International human rights violations, war crimes, & future implications. *War Crimes, & Future Implications* (March 20, 2023).